

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Penerapan Kebijakan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Batam, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah sudah melakukan penerapan dan kebijakan yang baik namun belum maksimal dalam melaksanakannya. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas di bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar BBNKB sudah cukup baik, namun masih diperlukan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya menyadari manfaat pembayaran tersebut. Meskipun berbagai kanal informasi telah tersedia, efektivitas penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar wajib pajak lebih memahami persyaratan administrasi yang berlaku.

Tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masih ditemukan, terutama terkait pemenuhan kewajiban administrasi yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, meskipun masyarakat umumnya mampu beradaptasi dengan perubahan, masih terdapat kendala bagi kelompok tertentu, seperti masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi atau yang berada di daerah terpencil, dalam mengakses layanan pajak secara optimal. Petugas Samsat berperan penting dalam memberikan informasi yang jelas dan responsif, namun masih terdapat hambatan dalam memastikan bahwa seluruh wajib pajak memahami prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, kolaborasi dengan pihak eksternal sebagai strategi peningkatan pemahaman masyarakat masih belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga peluang ini perlu dioptimalkan. Selain aspek kesadaran dan administrasi, faktor ekonomi juga menjadi tantangan utama. Tidak semua masyarakat memiliki

kemampuan yang sama dalam memenuhi kewajiban pajak, terutama di tengah kondisi daya beli yang menurun dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif agar sistem perpajakan lebih inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran peneliti yang dapat diusulkan guna meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Batam:

1. Peningkatan Edukasi Dan Sosialisasi Pajak

Pemerintah daerah perlu mengintensifkan edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban membayar BBNKB, baik melalui media digital maupun pendekatan langsung kepada masyarakat. Program edukasi ini sebaiknya difokuskan pada kelompok yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai manfaat dan prosedur pembayaran pajak.

2. Optimalisasi Penyebaran Informasi

Meskipun berbagai kanal informasi telah tersedia, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penggunaan media sosial, aplikasi berbasis teknologi, serta layanan konsultasi yang lebih responsif.

3. Peningkatan Akseibilitas Dan Pelayanan Pajak

Untuk memastikan seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah, layanan pajak harus semakin inklusif. Pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan layanan berbasis digital yang lebih ramah pengguna, serta peningkatan infrastruktur pelayanan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.

4. Penguatan Kolaborasi Dengan Pihak Eksternal

Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat, perlu ditingkatkan untuk

memperluas jangkauan sosialisasi serta menciptakan inovasi dalam layanan perpajakan. Dengan kolaborasi yang lebih erat, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat lebih meningkat.

5. Kebijakan Yang Lebih Adaptif Dan Responsif

Mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan adaptif. Pemerintah dapat mempertimbangkan insentif pajak, keringanan bagi kelompok tertentu, atau skema pembayaran yang lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan sistem perpajakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dapat terwujud, sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.